

## PENERIMAAN BERSYARAT ATAS PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN: STUDI PERSEPSI DAN DINAMIKA SOSIAL DI KAWASAN KOTA JAMBI

M. Farandika Akbar<sup>1\*</sup>, Muhammad Guntur<sup>2</sup> dan Royhan Himawan Putra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Profesi Insinyur, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

\*Email Koresponden: [farandikaakbar@unja.ac.id](mailto:farandikaakbar@unja.ac.id)

Diterima: 03-05-2026, Revisi: 26-05-2026, Disetujui: 30-05-2026

©2026 Universitas Hamzanwadi

**Abstrak.** Pembangunan kawasan perumahan di wilayah perkotaan sering diposisikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama memunculkan dinamika sosial dan kekhawatiran ekologis di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola penerimaan sosial masyarakat terhadap pembangunan perumahan di Kota Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 100 responden di dua wilayah pengembangan perumahan yakni Kecamatan Alam Barajo dan Paal Merah Kota Jambi. Analisis data kemudian dilakukan secara deskriptif mendalam dengan menguraikan hasil bahwa 100% responden menyatakan dukungan terhadap pembangunan, yang dipersepsikan sebagai proses urbanisasi yang tidak terhindarkan dan sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan hunian di kawasan perkotaan. Manfaat utama yang diharapkan adalah terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha serta manfaat perkembangan ekonomi secara langsung hingga peluang perkembangan infrastruktur perkotaan. Namun demikian, dukungan tersebut bersifat bersyarat dan didominasi kekhawatiran terhadap potensi banjir dan persoalan persampahan, diikuti kepadatan lalu lintas serta peningkatan kriminalitas perkotaan. Temuan ini menunjukkan pola penerimaan pragmatis atau dukungan kritis, di mana masyarakat secara simultan melakukan kalkulasi atas manfaat ekonomi dan risiko sosial-ekologis. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan perumahan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekologis di kawasan perkotaan.

**Kata kunci:** persepsi masyarakat, dukungan kritis, pembangunan perumahan, urbanisasi

**Abstract.** Housing development in urban areas is often positioned as an indicator of economic growth, but at the same time it raises social dynamics and ecological concerns at the local level. This study aims to analyze the patterns of social acceptance of housing development in the city of Jambi. The study uses a quantitative-descriptive approach through a survey of 100 respondents in two housing development areas. The results show that 100% of respondents expressed support for the development, which is perceived as an inevitable process of urbanization and a response to the increasing need for housing in urban areas. The main benefits expected are the opening up of job opportunities and business opportunities, as well as direct economic development benefits and opportunities for urban infrastructure development. However, this support is conditional and dominated by concerns about the potential for flooding and waste management issues, followed by traffic congestion and an increase in urban crime. These findings reveal a pattern of pragmatic acceptance or critical support, whereby communities simultaneously calculate economic benefits and socio-ecological risks. This study emphasizes the importance of a responsive, participatory, and socio-ecologically sustainable approach to housing development in urban areas.

**Keywords:** community perception, critical support, housing development, urbanization

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan kawasan perkotaan di Indonesia selama dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama ditandai dengan perluasan pembangunan perumahan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Urbanisasi, mobilitas ekonomi, dan

pertumbuhan kelas menengah telah mendorong permintaan akan lahan untuk penyediaan perumahan. Meskipun laju urbanisasi di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, percepatan ini tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dibandingkan dengan sejumlah negara berkembang lain yang memiliki pola urbanisasi serupa, pencapaian pembangunan Indonesia masih relatif tertinggal. Selain itu, proses urbanisasi yang sedang berlangsung telah berkontribusi pada munculnya ketimpangan pembangunan, baik antarwilayah maupun antar kelompok sosial di dalam kawasan perkotaan itu sendiri (Nabal & Djaja, 2022).

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi semakin meningkatkan permintaan akan perumahan. Kedua faktor ini terjadi di seluruh Indonesia. Pasokan perumahan tidak mampu memenuhi permintaan, sehingga menyebabkan kekurangan kawasan pemukiman (Perdamaian & Zhai, 2024). Dalam konteks ini, pembangunan perumahan tidak lagi sekadar proyek properti, melainkan bagian dari dinamika transformasi perkotaan. Faktor-faktor utama yang memengaruhi permintaan perumahan antara lain lokasi rumah, kedekatan dengan tempat kerja, sistem transportasi yang efisien, kedekatan dengan sekolah anak-anak, serta jarak ke fasilitas umum lainnya (Ozabor et al., 2024).

Selain itu, meningkatnya minat generasi muda untuk memiliki properti sendiri juga menjadi faktor yang memperkuat urgensi pembangunan perumahan di kawasan perkotaan. Fenomena ini tak terlepas dari momentum bonus demografi (Puspitasari, Adianto, & Khoirunurrofik, 2022), di mana proporsi penduduk usia produktif cukup tinggi dan mereka sedang memasuki fase membangun keluarga serta mencapai stabilitas ekonomi. Kepemilikan properti tidak lagi sekadar kebutuhan dasar, melainkan juga simbol kemandirian, investasi jangka panjang, dan jaminan sosial bagi generasi muda, terutama mereka yang berada dalam usia produktif dan sedang memulai karier serta membangun keluarga baru (Valentina, Surjono, & Wijaya, 2022). Kenaikan harga rumah, pendapatan yang tidak mencukupi, dan kebutuhan gaya hidup menjadi tantangan bagi generasi milenial dalam memiliki properti (Rethabfahisa & Ariyanto, 2025). Dalam konteks ini, permintaan akan perumahan tidak hanya didorong oleh pertumbuhan penduduk, tetapi juga oleh aspirasi sosial-ekonomi kelompok usia produktif, yang berlomba-lomba membeli properti sebelum harga tanah semakin melonjak (Wu et al., 2024). Kondisi ini semakin menegaskan bahwa pembangunan perumahan merupakan bagian dari dinamika struktural demografi dan transformasi sosial perkotaan, bukan sekadar perluasan sektor properti.

Namun, perluasan permukiman sering kali menimbulkan dampak sosial dan ekologis, meskipun ada manfaat ekonomi yang positif (Pratama, Roychansyah, & Hergawati, 2020). Perubahan penggunaan lahan dan gangguan vegetasi, peningkatan limpasan air permukaan, kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, pasokan air, serta perubahan dalam struktur sosial masyarakat sekitar merupakan isu-isu yang sering muncul dalam berbagai studi pengembangan perkotaan (Ramadhan & Syaban, 2024). Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih berfokus pada dampak lingkungan dari segi teknis (Marilele & Kubanza, 2025) atau konflik sosial berupa penolakan masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan (Herdiana, 2018). Faktanya, dalam banyak kasus, reaksi masyarakat tidak selalu berupa penolakan terbuka, melainkan penerimaan yang disertai kekhawatiran.

Fenomena penerimaan bersyarat ini tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan dalam proses pembangunan. Dalam banyak kasus, proyek perumahan dilaksanakan di atas lahan yang telah dilegitimasi secara hukum melalui proses perizinan dan pembebasan lahan oleh pengembang. Kondisi ini secara struktural menempatkan masyarakat sekitar pada posisi tawar yang relatif lemah, karena ruang lingkup negosiasi terkait kelanjutan proyek menjadi terbatas. Ketika persyaratan hukum formal telah dipenuhi, opsi penolakan oleh masyarakat menjadi semakin terbatas dan cenderung bergeser ke arah tuntutan pengelolaan dampak daripada penghentian proyek. Pada akhirnya, proses negosiasi antara perencana dan pengembang tidak boleh berhenti pada perhitungan biaya dan manfaat semata. Negosiasi perlu diperluas untuk memberikan ruang bagi penyediaan kawasan perumahan sambil memastikan keberlanjutan sosial jangka panjang. (Bouwmeester et al., 2024).

Daya tawar yang rendah ini membentuk pola adaptasi sosial yang rasional. Alih-alih melakukan perlawanan yang berpotensi tidak efektif, masyarakat lebih memilih strategi penerimaan bersyarat, dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi sekaligus meminimalkan risiko lingkungan. Dalam konteks ini, dukungan masyarakat bukan sekadar cerminan persetujuan normatif, melainkan hasil perhitungan realistis atas posisi mereka dalam struktur pembangunan, yang mereka harapkan masih

memberikan ruang bagi masukan demokratis terhadap isi rencana pembangunan (Lennon, Dunphy, & Sanvicente, 2019). Mereka menyadari bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut karena memiliki legitimasi formal, sehingga fokus mereka pun beralih ke upaya memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak akan merusak lingkungan dan kehidupan sosial mereka. Namun, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan pandangan masyarakat sebagai pihak yang paling dekat dan paling langsung terdampak oleh proyek pembangunan tersebut (Muhammad et al., 2024).

Fenomena ini menarik untuk diamati. Di satu sisi, pembangunan perumahan dipandang sebagai kebutuhan yang tak terelakkan akibat tekanan permintaan perumahan di perkotaan. Di sisi lain, masyarakat tetap merasa khawatir terhadap risiko lingkungan seperti banjir dan pengelolaan sampah, serta risiko sosial seperti kemacetan lalu lintas dan kejahatan. Situasi ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat tidak bersifat hitam-putih, melainkan bersifat kondisional dan dapat dinegosiasikan..

Studi mengenai penerimaan masyarakat terhadap pembangunan umumnya menempatkan dukungan dan penolakan sebagai dua kutub yang berseberangan. Namun, hanya sedikit penelitian yang meneliti fenomena dukungan penuh yang disertai kesadaran kritis terhadap risiko pembangunan. Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi relevan, karena bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola rasionalitas sosial di balik dukungan masyarakat terhadap proyek perumahan di kawasan perkotaan.

Keunikan yang ditawarkan oleh penelitian ini terletak pada pendekatan analitisnya terhadap apa yang disebut sebagai “dukungan kritis”, yaitu suatu kondisi di mana masyarakat secara bersamaan menerima urgensi pembangunan perumahan perkotaan sambil tetap menuntut tata kelola lingkungan dan sosial yang bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan survei terhadap 100 responden di dua kawasan pengembangan perumahan di Kota Jambi, yaitu Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Paal Merah, yang mengalami peningkatan luas lahan terbangun tertinggi serta pertumbuhan penduduk tercepat di Kota Jambi (Mardalena, Supriatna, & Dimiyati, 2025). Penelitian ini tidak hanya memetakan persepsi masyarakat, tetapi juga mengungkap bagaimana perhitungan manfaat ekonomi dan risiko ekologis membentuk legitimasi sosial bagi pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian pembangunan perkotaan dengan memandang masyarakat bukan sebagai pihak yang pasif atau penentang, melainkan sebagai subjek rasional yang turut berperan dalam menegosiasikan perubahan tata ruang. Pemahaman ini penting dalam merumuskan strategi pengelolaan pembangunan perumahan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif-analitis (Sheikh et al., 2024). Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi pola persepsi masyarakat terhadap pembangunan perumahan serta menganalisis hubungan antara dukungan, kekhawatiran, dan manfaat yang dirasakan. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dinamika penerimaan sosial dalam konteks pembangunan perumahan di kawasan perkotaan.

Penelitian ini dilakukan di dua kawasan pengembangan perumahan di Kota Jambi, yaitu Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Paal Merah. Lokasi-lokasi tersebut dipilih secara sengaja, dengan mempertimbangkan adanya proyek-proyek pengembangan perumahan yang sedang berlangsung dan yang direncanakan, serta paparan langsung masyarakat terhadap potensi dampak sosial dan lingkungan. Pemilihan ini didasarkan pada fakta empiris bahwa Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Paal Merah merupakan kawasan yang mengalami peningkatan luas lahan terbangun tertinggi dan pertumbuhan penduduk tercepat di Kota Jambi (Mardalena et al., 2025).

Populasi penelitian terdiri dari masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar lokasi pembangunan perumahan di Kota Jambi. Jumlah populasi yang tepat tidak dapat ditentukan karena tidak ada batas administratif khusus yang secara eksplisit menentukan masyarakat yang terkena dampak langsung. Oleh karena itu, ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Lemeshow (Lameshow & David, 1997) untuk populasi yang tidak diketahui (populasi tak terhingga).

$$n = \frac{Z^2 \cdot p(1 - p)}{d^2}$$

dengan:

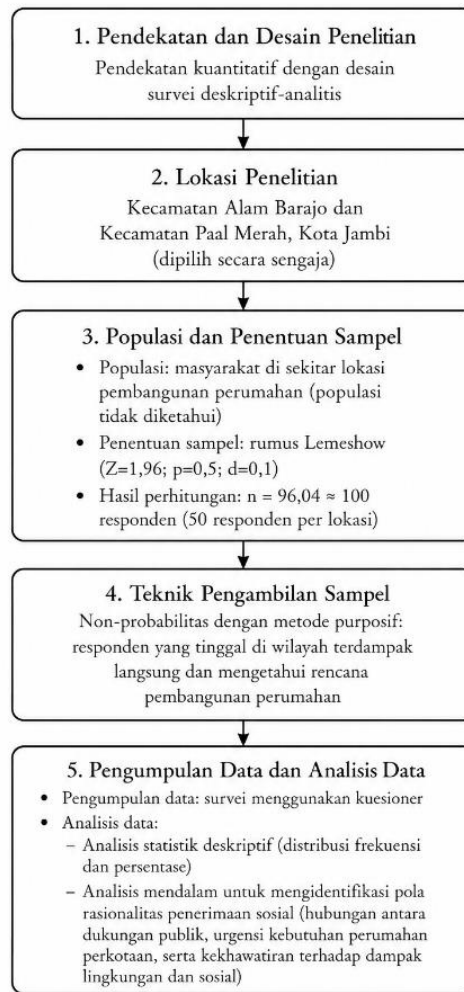
- $n$  = sample size
- $Z$  = Z-value at the confidence level 95% (1,96)
- $p$  = estimated proportion of occurrence (assumed to be 0.5 to obtain the maximum sample size)
- $d$  = margin of error (0,1)

Berdasarkan perhitungannya maka :

$$\begin{aligned}n &= \frac{(1,96)^2 \cdot 0,5(1 - 0,5)}{(0,1)^2} \\n &= \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01} \\n &= \frac{0,9604}{0,01} \\n &= 96,04\end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96 responden. Untuk meningkatkan representativitas dan memudahkan distribusi di antara wilayah penelitian, jumlah sampel dibulatkan ke atas menjadi 100 responden (Saripah, Rahmat, & Az Zahra, 2023), dengan 50 responden di setiap lokasi penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pendekatan pengambilan sampel non-probabilitas dengan metode pengambilan sampel purposif (Memon et al., 2025), yang melibatkan pemilihan responden yang tinggal di wilayah yang terkena dampak langsung dan memiliki pengetahuan tentang rencana pembangunan perumahan. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa responden benar-benar relevan dengan konteks penelitian.

Data tersebut dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menyajikan distribusi frekuensi dan persentase untuk setiap variabel yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren dominan dalam persepsi masyarakat terhadap pembangunan perumahan. Selain itu, hasil deskriptif tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola rasionalitas dalam penerimaan sosial, khususnya terkait hubungan antara dukungan publik, tingkat urgensi kebutuhan perumahan perkotaan, dan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial. Pendekatan ini memungkinkan ditarik kesimpulan mengenai bentuk “dukungan kritis” sebagai ciri khas penerimaan publik terhadap proyek-proyek pembangunan. Adapun secara ringkas, alur penelitian tergambar pada diagram sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Diagram Alir Penelitian  
(Sumber: Rancangan peneliti, 2026)

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Karakteristik Responden

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai responden yang terlibat dalam penelitian ini, telah dilakukan survei guna mengidentifikasi karakteristik umum mereka. Informasi yang dikumpulkan meliputi usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama tinggal, serta status kepemilikan properti di wilayah penelitian. Data ini disajikan untuk memberikan konteks dan mendukung analisis lebih lanjut terhadap temuan penelitian.

**Tabel 1.** Gambaran Umum Karakteristik Responden

Variabel	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia	20 – 29 Tahun	16	16%
	30 – 39 Tahun	41	41%
	40 – 49 Tahun	25	25%
	≥ 50 Tahun	18	18%
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
Pendidikan	SD Sederajat	10	10%
	SMP Sederajat	17	17%
	SMA Sederajat	39	39%
	Diploma / Sarjana	34	34%
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

<b>Profesi</b>	Wirausaha	30	30%
	Pegawai Swasta	18	18%
	ASN	20	20%
	Buruh	22	22%
	Petani	5	5%
	Sopir	5	5%
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
<b>Lama Tinggal</b>	0 – 4 Tahun	26	26%
	5 – 9 Tahun	34	34%
	≥ 10 Tahun	40	40%
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
<b>Status Kepemilikan Rumah</b>	Milik Sendiri	42	42%
	Kontrak / KPR	39	39%
	Rumah Orang Tua	19	19%
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2026

Berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden di dua kawasan perumahan di Kota Jambi, struktur usia responden didominasi oleh kelompok usia produktif. Sebanyak 41% berada dalam kelompok usia 30–39 tahun dan 25% berada dalam kelompok usia 40–49 tahun, sedangkan 16% berusia 20–29 tahun dan sisanya berusia 50 tahun ke atas. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada fase kehidupan yang aktif secara ekonomi dan sosial, sehingga memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas lingkungan tempat tinggal mereka dan peluang ekonomi yang mungkin timbul dari pembangunan perumahan.

Berdasarkan tingkat pendidikan formal, 39% responden adalah lulusan sekolah menengah atas dan 34% memiliki gelar sarjana atau setara, sedangkan 10% telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan 17% telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama. Struktur ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi, yang berpotensi memengaruhi kemampuan mereka untuk menilai dampak sosial dan lingkungan secara rasional. Tingkat pendidikan ini mungkin juga menjelaskan mengapa responden tidak langsung menolak pembangunan, tetapi cenderung memberikan dukungan setelah mempertimbangkannya dengan cermat.

Dari segi profesi dan pekerjaan, responden didominasi oleh pengusaha dan pekerja mandiri (secara kumulatif sekitar 48%), diikuti oleh pegawai negeri (20%), buruh (22%), serta sejumlah kecil petani dan sopir (masing-masing 5%). Komposisi ini menunjukkan struktur ekonomi yang cukup beragam, dengan kecenderungan yang kuat ke arah sektor informal dan wirausaha. Kondisi ini relevan dalam memahami dukungan masyarakat terhadap pembangunan, karena pembangunan perumahan sering dikaitkan dengan peluang ekonomi baru, terutama bagi usaha kecil dan penyedia jasa.

Selain itu, dalam hal lama tinggal, 40% responden telah tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun dan 34% selama 5-9 tahun. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden memiliki ikatan historis dan emosional dengan wilayah tersebut. Kelompok ini memiliki pengalaman langsung terkait dinamika perubahan lingkungan dan infrastruktur, sehingga persepsi mereka terhadap pembangunan bukanlah sekadar spekulasi, melainkan didasarkan pada pengalaman sosial yang nyata. Kondisi ini relevan dengan hasil studi yang menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pembangunan infrastruktur memiliki persepsi positif dan negatif terhadap perubahan lingkungan berdasarkan pengalaman langsung mereka dalam kehidupan sehari-hari (Damis et al., 2023).

Data kepemilikan rumah menunjukkan bahwa 42% responden tinggal di rumah milik sendiri, 39% menyewa atau memanfaatkan skema KPR, dan sisanya tinggal bersama orang tua. Pola ini mencerminkan perpaduan antara kelompok yang sudah mapan dan kelompok yang masih dalam proses mobilitas sosial. Kepemilikan properti yang relatif stabil dapat memperkuat kepekaan terhadap potensi dampak lingkungan seperti banjir dan kemacetan lalu lintas, karena individu-individu ini memiliki investasi jangka panjang di wilayah tersebut. Dalam konteks banjir dan risiko lingkungan lainnya, pengalaman langsung masyarakat di daerah rawan bencana, ditambah dengan status kepemilikan

properti, merupakan faktor penting yang membentuk persepsi risiko berdasarkan pengalaman sosial nyata, bukan sekadar asumsi spekulatif (Sirait et al., 2025).

Secara keseluruhan, karakteristik responden menggambarkan profil masyarakat perkotaan yang produktif dan relatif berpendidikan, dengan ikatan emosional yang kuat terhadap tempat tinggalnya. Ikatan emosional terhadap tempat tinggal merupakan salah satu faktor penentu utama dalam sikap masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka, di mana faktor-faktor sosial, kedekatan fisik, dan pengalaman hidup di suatu wilayah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ikatan emosional dan komitmen penduduk terhadap wilayah mereka (Andhini & Ernawadi, 2025). Kondisi ini merupakan konteks penting dalam memahami pola dukungan yang muncul terhadap pembangunan perumahan, yang tidak semata-mata didorong oleh optimisme, melainkan juga oleh perhitungan rasional mengenai potensi manfaat dan risikonya.

Sebagian besar masyarakat setempat menanggapi proyek perumahan tersebut secara positif, yang menunjukkan dukungan yang tidak didasari oleh sikap acuh tak acuh, melainkan oleh persepsi mereka sendiri mengenai manfaat sosial dan ekonominya (Setiowibowo, Kurniawan, & Usman, 2020). Komposisi sosioekonomi ini menunjukkan bahwa para responden bukanlah kelompok yang terpinggirkan atau bersikap pasif terhadap perubahan di ruang perkotaan. Mereka berada dalam usia produktif, relatif berpendidikan, memiliki rasa memiliki, dan sebagian besar memiliki kepentingan ekonomi langsung di wilayah tersebut. Dengan karakteristik tersebut, dukungan terhadap pembangunan perumahan tidak dapat ditafsirkan sebagai ketidaktahuan atau ketidakpedulian, melainkan sebagai hasil dari pertimbangan rasional dalam konteks urbanisasi yang terus berlanjut.

Oleh karena itu, temuan bahwa 100% responden menyatakan dukungan terhadap pembangunan patut dianalisis lebih lanjut: apakah dukungan ini mencerminkan optimisme terhadap manfaat pembangunan, bentuk pragmatisme dari masyarakat perkotaan, atau sekadar ungkapan penerimaan terhadap suatu proyek yang dianggap tak terhindarkan. Pertanyaan ini akan menjadi fokus pembahasan pada subbagian berikutnya.

### **Dukungan Penuh dan Rasionalitas Penerimaan Pembangunan**

Hasil survei menunjukkan bahwa 100% responden menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan perumahan di wilayah studi. Namun, dukungan ini tidak bersifat tanpa syarat. Semua responden menekankan bahwa pembangunan tersebut dapat diterima selama pengembang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan potensi dampak sosialnya. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat bersifat bersyarat dan rasional, bukan sekadar ungkapan persetujuan normatif. Penelitian empiris sebelumnya telah menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan meningkatkan kepercayaan dan dukungan mereka terhadap proyek-proyek pembangunan, yang menunjukkan bahwa dukungan bersifat bersyarat dan berkaitan dengan sejauh mana aspirasi lokal diperhitungkan dalam proses tersebut (Gugule & Mesra, 2023).

Menariknya, dukungan penuh ini bertepatan dengan kesadaran akan potensi dampak negatif. Para responden mengidentifikasi beberapa masalah yang menjadi perhatian, termasuk potensi banjir, peningkatan kejahatan, kemacetan lalu lintas, dan masalah pengelolaan sampah. Kekhawatiran akan banjir menunjukkan kepekaan masyarakat terhadap daya dukung lingkungan dan sistem drainase di wilayah tersebut. Masalah kejahatan dan kemacetan lalu lintas mencerminkan kekhawatiran akan perubahan struktur sosial dan meningkatnya mobilitas penduduk. Sementara itu, pengelolaan sampah menjadi perhatian karena secara langsung berkaitan dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hasil-hasil ini memberikan penguatan positif terhadap penelitian yang menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman secara langsung menilai dampak lingkungan seperti banjir berdasarkan pengalaman aktual mereka terhadap kondisi infrastruktur dan perilaku spasial, serta menunjukkan keprihatinan terhadap isu-isu lain seperti pengelolaan sampah dan keamanan lingkungan (Yutantri et al., 2023).

Di sisi lain, masyarakat juga secara konsisten melihat manfaat positif dari pembangunan tersebut. Persepsi positif yang dominan meliputi peningkatan peluang kerja, peluang usaha baru, serta percepatan pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi proyek. Fakta bahwa sebagian besar responden bekerja di sektor wirausaha, pekerja mandiri, dan buruh memperkuat argumen bahwa pembangunan tersebut dipandang sebagai peluang ekonomi yang nyata, bukan sekadar harapan yang abstrak.

Selain itu, para responden juga meyakini bahwa pembangunan perumahan akan memicu munculnya usaha-usaha baru di kawasan sekitarnya, seperti warung makan, jasa laundry, jasa kuliner, minimarket, dan layanan berbasis rumah tangga lainnya. Persepsi ini didasarkan pada pemahaman bahwa penghuni perumahan perkotaan umumnya memiliki karakteristik psikologis yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pola konsumsi masyarakat perkotaan cenderung mengutamakan kedekatan dan efisiensi waktu, sehingga berbelanja dan memenuhi kebutuhan rutin lebih sering dilakukan di sekitar tempat tinggal.

Dalam konteks sosial-ekonomi lokal, pembangunan perumahan dapat membuka peluang bisnis baru dan membawa perubahan pada mata pencaharian masyarakat setempat, termasuk pertumbuhan kegiatan mikroekonomi sebagai bagian dari transformasi ekonomi lingkungan perumahan (Rakhmawati, 2016). Kondisi ini memperkuat keyakinan para responden bahwa peluang usaha lokal akan berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah hunian, sehingga pembangunan tersebut tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja formal, tetapi juga mendorong perekonomian mikro di tingkat lingkungan.

**Tabel 2.** Aspek Persepsi dari Responden

Aspek Persepsi	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kekhawatiran Responden	Potensi Banjir	38	38%
	Masalah Persampahan	29	29%
	Bangkitan Lalulintas	18	18%
	Peningkatan Kriminalitas	15	15%
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
Manfaat Proyek	Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha	35	35%
	Manfaat Ekonomi	23	23%
	Potensi Perkembangan Infrastruktur	22	22%
	Peningkatan Kesempatan Kepemilikan Properti	20	20%
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2026

Distribusi persepsi pada Tabel 2 menunjukkan pola yang cukup jelas: kekhawatiran masyarakat didominasi oleh isu-isu lingkungan, terutama potensi banjir (38%) dan masalah pengelolaan sampah (29%), yang secara kumulatif mencapai 67%. Angka ini menunjukkan bahwa dimensi ekologis menjadi perhatian yang lebih besar daripada isu-isu sosial seperti kejahatan (15%) dan kemacetan lalu lintas (18%). Di sisi lain, alasan terkuat untuk mendukung proyek ini didasarkan pada penciptaan lapangan kerja dan peluang bisnis (35%) serta manfaat ekonomi langsung (23%), yang secara kumulatif mencapai 58%. Pola ini menegaskan adanya rasionalitas ganda dalam sikap masyarakat, di mana mereka menyadari risiko ekologis yang nyata namun tetap memandang pembangunan sebagai instrumen mobilitas ekonomi. Dengan kata lain, dukungan yang muncul bukanlah euforia pembangunan, melainkan kompromi rasional antara kebutuhan ekonomi dan kekhawatiran terhadap daya dukung lingkungan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, persepsi masyarakat terhadap risiko lingkungan dibentuk oleh pengalaman sosial kolektif dan nilai-nilai budaya, yang pada akhirnya memengaruhi dukungan mereka terhadap pembangunan secara signifikan, bukan sekadar secara normatif atau spekulatif (Hidayah S & Umar, 2025). Dukungan masyarakat tersebut dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas adaptif dalam konteks urbanisasi, yang dianggap tak terhindarkan. Beberapa responden bahkan menyatakan bahwa proyek pembangunan tersebut “tak terelakkan,” yang menunjukkan kesadaran kolektif bahwa dinamika pembangunan perkotaan akan terus berlanjut. Dalam kerangka ini, masyarakat tidak memosisikan diri sebagai kelompok yang menolak perubahan, melainkan sebagai aktor yang ingin memastikan bahwa perubahan tersebut dikelola secara bertanggung jawab.

Temuan-temuan ini mengungkap pola “dukungan kritis,” yaitu penerimaan terhadap pembangunan yang disertai dengan tuntutan akan tata kelola lingkungan yang baik. Pola ini penting dalam konteks perencanaan pembangunan berkelanjutan, karena menunjukkan bahwa legitimasi sosial suatu proyek tidak hanya bergantung pada manfaat ekonomi, tetapi juga pada sejauh mana para pengembang mampu menangani masalah-masalah lingkungan dan sosial yang muncul.

## **Dinamika Sosial dan Pola Dukungan Kritis dalam Masyarakat**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan tidak berada dalam ruang sosial yang statis, melainkan merupakan bagian dari dinamika sosial perkotaan yang terus berlangsung. Persepsi bahwa proyek-proyek tersebut “tak terhindarkan” menunjukkan kesadaran kolektif akan proses urbanisasi dan perluasan perkotaan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi memandang pembangunan sebagai sebuah pilihan, melainkan sebagai kebutuhan struktural. Namun, dukungan yang muncul tersebut bukanlah dukungan pasif. Adanya kekhawatiran yang kuat terkait banjir, pengelolaan sampah, kemacetan lalu lintas, dan kejahatan menunjukkan adanya proses negosiasi sosial terkait perubahan. Masyarakat menerima pembangunan, namun dengan tuntutan implisit agar tata kelola lingkungan dan sosial dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pola ini menunjukkan bentuk adaptasi sosial yang rasional, di mana masyarakat berusaha memaksimalkan peluang ekonomi sekaligus meminimalkan risiko ekologis.

Persepsi dukungan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mereka akan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk menyediakan perumahan di kawasan perkotaan. Responden secara implisit menunjukkan kesadaran bahwa pertumbuhan penduduk, mobilitas ekonomi, dan perluasan aktivitas perkotaan mendorong meningkatnya permintaan akan perumahan. Dalam konteks ini, pembangunan perumahan dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan nyata kota, bukan sekadar sebagai proyek bisnis. Kesadaran ini membentuk sikap yang lebih realistis dan adaptif terhadap perubahan spasial.

Selain itu, struktur usia responden yang didominasi oleh kelompok usia produktif, serta beragamnya status kepemilikan properti mereka, menunjukkan bahwa perumahan bukanlah isu yang jauh dari pengalaman hidup mereka. Sebagian sedang berada dalam fase membangun stabilitas ekonomi keluarga, sementara yang lain masih dalam proses mobilitas sosial melalui skema sewa atau pinjaman perumahan. Situasi ini telah membuat mereka memahami bahwa ketersediaan lahan dan perumahan merupakan bagian dari siklus pembangunan perkotaan yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan generasi sekarang dan masa depan, mengingat fenomena urbanisasi yang terus berlangsung. Ketersediaan lahan untuk perumahan harus diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan perkotaan, karena laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan akan perumahan yang layak, yang berdampak pada perencanaan tata ruang perkotaan secara keseluruhan (Zefri & Muchifudin, 2019).

Oleh karena itu, dukungan yang muncul dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran pragmatis akan urgensi penyediaan ruang hunian di kawasan perkotaan. Masyarakat menyadari bahwa tanpa pengembangan kawasan baru, tekanan terhadap permukiman yang sudah ada dapat meningkat, baik dalam bentuk kepadatan penduduk, kenaikan harga tanah, maupun keterbatasan akses terhadap perumahan. Oleh karena itu, penerimaan terhadap proyek-proyek pembangunan tidak hanya didasarkan pada potensi manfaat ekonomi, tetapi juga pada pemahaman bahwa penyediaan perumahan merupakan bagian dari agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, dengan syarat bahwa pengelolaan dampak lingkungan dan sosial tetap menjadi prioritas utama.

Dinamika ini juga dapat diartikan sebagai transformasi orientasi masyarakat dari sekadar “komunitas tempat tinggal” menjadi “komunitas kepentingan.” Hal ini berarti bahwa kepentingan ekonomi mulai memainkan peran penting dalam membentuk sikap terhadap perubahan spasial. Struktur pekerjaan responden, yang didominasi oleh sektor bisnis dan jasa, memperkuat tren ini, karena pembangunan dipandang sebagai pembuka akses ke pasar dan peluang bisnis baru. Studi tentang sektor informal dan pembangunan ekonomi perkotaan menunjukkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di daerah perkotaan cenderung menilai perubahan spasial berdasarkan peluang ekonomi dan mobilitas sosial, yang mencerminkan bahwa orientasi mereka melampaui sekadar komunitas berbasis ruang (Adam & Ilham, 2023).

Akibatnya, dinamika sosial yang terjadi bukanlah polarisasi antara kelompok pro dan kontra, melainkan konsensus pragmatis yang bersyarat. Konsensus ini bersifat rapuh jika masalah lingkungan tidak ditangani dengan baik, namun dapat menjadi legitimasi sosial yang kuat jika proyek tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, dukungan masyarakat dapat dipahami

sebagai bentuk “dukungan kritis” yang mencakup baik harapan maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan.

### **Implikasi Tata Kelola dan Penguatan Legitimasi Sosial Pembangunan**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan penuh masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan bukanlah legitimasi tanpa syarat, melainkan suatu bentuk “dukungan kritis” yang menuntut tata kelola lingkungan dan sosial yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, implikasi utama dari penelitian ini adalah pentingnya memperkuat dimensi pengelolaan dampak sejak tahap perencanaan. Isu-isu banjir dan pengelolaan sampah yang muncul sebagai perhatian utama menunjukkan bahwa aspek daya dukung lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam perancangan kawasan, termasuk sistem drainase terpadu, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah berbasis kawasan.

Selain itu, kekhawatiran terkait kemacetan lalu lintas dan potensi kejahatan menunjukkan bahwa pembangunan perumahan tidak dapat dianggap sebagai proyek sektoral semata. Integrasi dengan perencanaan transportasi, pengaturan aksesibilitas jalan, serta penyediaan fasilitas keamanan sosial dan lingkungan merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan suatu proyek tidak hanya diukur dari jumlah unit perumahan yang dibangun, tetapi juga dari kemampuannya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan layak huni (Untsa, 2024).

Di sisi lain, persepsi positif masyarakat terhadap peluang kerja, usaha, dan manfaat ekonomi menjadi modal sosial yang kuat bagi para pengembang. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam bentuk strategi untuk melibatkan masyarakat setempat dalam rantai ekonomi proyek, baik melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan usaha kecil, maupun penyediaan ruang komersial yang inklusif. Partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan tidak hanya meningkatkan legitimasi sosial proyek, tetapi juga membantu memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat ekonomi yang nyata melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fadhli & Annisa, 2024). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial pembangunan dalam jangka panjang.

Selain itu, temuan bahwa masyarakat memahami urgensi penyediaan lahan perumahan di kawasan perkotaan menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap dinamika urbanisasi. Kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah daerah dan pengembang untuk membangun komunikasi publik yang transparan dan partisipatif. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan kekhawatiran mereka ditanggapi secara konkret, dukungan sosial dapat berkembang menjadi bentuk kepercayaan yang berkelanjutan. Implikasi strategis dari studi ini menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan tidak hanya ditentukan oleh kelayakan teknis dan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola lingkungan serta kemampuan untuk membangun kontrak sosial dengan masyarakat sekitar. Dukungan masyarakat sudah ada, tantangannya adalah memastikan bahwa dukungan tersebut tidak berubah menjadi penolakan akibat pengelolaan dampak yang kurang optimal.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung pembangunan perumahan karena dipandang mampu menjawab kebutuhan lahan hunian di kawasan perkotaan sekaligus membuka peluang ekonomi melalui lapangan kerja dan aktivitas usaha masyarakat sekitar. Namun, dukungan tersebut bersifat kritis dan bersyarat, karena masyarakat tetap menaruh perhatian besar terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial, seperti banjir, pengelolaan limbah, kemacetan lalu lintas, serta peningkatan risiko kejahatan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pengembang dan pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola yang bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif. Oleh karena itu, penguatan sistem drainase, pengelolaan limbah, pengaturan transportasi, keamanan lingkungan, serta pelibatan tenaga kerja dan usaha lokal perlu menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. F., & Ilham, M. (2023). Migran Sektor Informal dan Reproduksi Ruang Sosial Kota Menengah di Perbatasan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 432–444. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/neoresjurnal.v4i2.82>
- Andhini, P. L., & Ernawadi, Y. (2025). Contribution Of Residential Well-Being And Place Attachment In Mediating The Influence Of Place Image On Affective Resident Commitment. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(4), 3104–3121. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/703m3m12>
- Bouwmeester, J., Hartmann, T., Ay, D., & Gerber, J. (2024). Land Use Policy Making room for affordable housing : Project-based negotiations between planning authorities and landowners in Dutch and Swiss densification. *Land Use Policy*, 144, 107264. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107264>
- Damis, Surianti, Hasrianti, Putri, A. R. S., & Mursalat, A. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Cempae. *Jurnal Ilmiah Wahana Laut Lestari*, 1(1), 12–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jiwall.v1i1.313>
- Fadhli, M., & Annisa, Y. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pemetaan Sosial Ekonomi. *Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 117–134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jmm.v9i1.29265>
- Gugule, H., & Mesra, R. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kota Kotamobagu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2), 1691–1699. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5008/http>
- Herdiana, D. (2018). The Impact Of Housing Development On The Social Change Of Villagers ( Case Of Jayamekar Village , Bandung Barat District). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 14(4), 265–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/pwk.v14i4.20444>
- Hidayah S, S., & Umar, G. (2025). Konstruksi Sosial terhadap Risiko Lingkungan dan Implikasinya terhadap Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education*, 3(1), 31–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.71383/tase.v3i1.84>
- Lameshow, S., & David, J. (1997). *Besar Sampel dan Penelitian Kesehatan (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lennon, B., Dunphy, N. P., & Sanvicente, E. (2019). Community acceptability and the energy transition : a citizens ' perspective. *Journal of Energy, Sustainability and Society*, 9(35), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s13705-019-0218-z>
- Mardalena, A., Supriatna, & Dimiyati, M. (2025). Permodelan Spasial Lahan Terbangun Kota Jambi. *Majalah Geografi Indonesia*, 39(1), 9–18. <https://doi.org/10.22146/mgi.70636>
- Marilele, M. H., & Kubanza, N. S. (2025). Environmental and social impacts of human settlement development projects in the City of Ekurhuleni Municipality , South Africa. *Local Environment*, 9839, 1–20. <https://doi.org/10.1080/13549839.2025.2543306>
- Memon, M. A., Thurasamy, R., Ting, H., & Cheah, J.-H. (2025). Purposive Sampling : A Review And Guidelines For Quantitative Research. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 9(1), 1–23. [https://doi.org/10.47263/JASEM.9\(1\)01](https://doi.org/10.47263/JASEM.9(1)01)
- Muhammad, S., Arifin, S., Syam, R., & Putra, B. A. (2024). On the brink of social resistance : local community perceptions of mining company operating permits in East Luwu , Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 9(1373736), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1373736>
- Nabal, A. R. J., & Djaja, K. (2022). Tourism impact on changing pattern of urbanization in Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(1), 70–84.

<https://doi.org/10.20961/region.v17i1.41465>

- Ozabor, F., Ike, P., Onyeayana, V., & Obisesan, A. (2024). Urban Governance Determinants of housing demands and residential rent costs in an emerging city in Southern Nigeria. *Urban Governance*, 4, 232–244. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2024.08.002>
- Perdamaian, L. G., & Zhai, Z. J. (2024). Status of Livability in Indonesian Affordable Housing. *Architecture Journal*, 4(2), 281–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/architecture4020017>
- Pratama, A., Roychansyah, S., & Hergawati, Y. (2020). Dampak Perkembangan Perumahan Terhadap Masyarakat di Sekitar Perumahan Kecamatan Baruga , Kota Kendari. *Jurnal Planoerath*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.1652>
- Puspitasari, D., Adiarto, J., & Khoirunurrofik. (2022). Preferensi hunian di perkotaan pada generasi Y di kota bekasi. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(1), 54–65. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i1.37176>
- Rakhmawati, R. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 1–10.
- Ramadhan, W., & Syaban, M. B. A. (2024). Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Perubahan Kondisi Lingkungan Di Desa Palasari Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. *Journal of Environmental Education and Sustainable Development*, 25(1), 52–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/plpb.v25i01.40657>
- Rethabfahisa, G. T., & Ariyanto, E. (2025). Analisis Preferensi Generasi Milenial Dalam Memilih Hunian Di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah MEA*, 9(1), 1596–1621. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5242>
- Saripah, R., Rahmat, B. Z., & Az Zahra, Q. S. (2023). Factors Affecting Muslim Consumers ' Purchasing Decisions on Cosmetics Product. *ECo-Buss Journal*, 6(2), 917–931. <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v6i2.1088>
- Setiowibowo, S., Kurniawan, E. B., & Usman, F. (2020). Hubungan Pembangunan Perumahan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Dan Lingkungan Permukiman Di Kelurahan Mlajah. *Journal of Planning for Urban Region and Environment*, 9(4), 131–142.
- Sheikh, M. A., Bajwa, F., Aslam, M. J., & Mir, B. (2024). Survey Research: Descriptive and Analytical Power, Types and Usages. *International Journal of Politics and Social Sciences Review*, 3(3), 231–239.
- Sirait, F. N. A., Luluk, T. A., Halim, J. I., Br. Manik, A., Rohani, & Kardian, E. (2025). Kondisi Sosial-Ekonomi dan Alasan Bertahannya Masyarakat di Daerah Rawan Banjir di Kelurahan Hamdan Medan Maimun Kota Medan. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(7), 39–47.
- Untsa, F. P. (2024). Meningkatkan Keamanan Kota Melalui Perencanaan Dan Perancangan Kota. *Blantika : Multidisciplinary Journal*, 2(6), 594–613.
- Valentina, D., Surjono, & Wijaya, I. N. S. (2022). Preferensi Bermukim Usia Produktif Kota Depok Dalam Menentukan Lokasi Perumahan. *Planning for Urban Region and Environment*, 11(4), 171–180.
- Wu, Y., Zha, Y., Zhang, L., Zhao, J., Wang, Y., & Fang, L. (2024). Transition of Youth ' s Housing Issues : A Survey in the Nanjing Metropolitan Coordinating Region, China. *Journal of Buildings*, 14(81), 1–19.
- Yutantri, V., Suryandari, R. Y., Putri, M. N., & Widyawati, L. F. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Faktor-Faktor Penyebab Banjir di Perumahan Total Persada Raya Kota Tangerang. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 199–214.
- Zefri, & Muchifudin. (2019). Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Pengembangan Perumahan di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, 15(1), 21–32.